

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat sangat membutuhkan peran serta masyarakat yang disertai pengetahuan memadai. Kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan itu, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan di berbagai bidang, termasuk di bidang perikanan. Kegiatan penyuluhan ini sangat penting dilakukan di Indonesia apabila mengingat kondisi teritorial yang terdiri dari banyak pulau. Banyaknya pulau itu sekaligus menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya sangat kaya akan potensi lautnya terutama pada sektor perikanan.

Potensi perikanan yang sangat besar akan menguntungkan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, nilai positif tersebut akan menjadi sia-sia apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik tentunya tidak hanya terkait dengan penguasaan negara atas sektor perikanan sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga terkait dengan seberapa besar kemampuan masyarakat ikut serta mengelola potensi perikanan dengan baik dan tidak rusak potensi yang ada. Karena itu, kegiatan penyuluhan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Penyuluhan sangat penting mengingat manfaat yang bisa diperoleh. Paling tidak, manfaat dilakukannya penyuluhan dapat berupa: penyebaran informasi, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, penguatan komunitas, dan lain sebagainya. Secara praktis, penyuluhan pertama kali dilakukan oleh James Stuart dari Fellow of Trinity College, Cambridge, pada tahun 1867-1868. Dalam hal ini, penyuluhan ialah pendidikan untuk pembangunan masyarakat atau *community development*.¹

Fakta di atas menunjukkan bahwa selain dapat meningkatkan pengetahuan sebagai modal pengelolaan potensi laut, penyuluhan dapat pula membentuk kesadaran masyarakat nelayan untuk menjaga potensi laut yang dimiliki dari segala bentuk pengrusakan. Namun demikian, agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka kegiatan penyuluhan harus merupakan bentuk kebijakan legal dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah harus berperan secara maksimal dalam kegiatan penyuluhan tersebut.

Peran pemerintah daerah harus dimaksimalkan keterlibatannya dalam agenda-agenda pembangunan nasional. Meadowcroft menyatakan peran dan fungsi pemerintah daerah dinilai sangat penting karena merupakan unit pemerintahan yang dianggap paling dekat dengan masyarakatnya.² Artinya, pentingnya peran dan fungsi pemerintah dalam

¹ Amanah, Siti, 2006, *Penyuluhan Perikanan*, dalam Jurnal Penyuluhan, Vol. 2, No. 4, Desember 2006, Institut Pertanian Bogor, hal. 62

² Meadowcroft, James, 1999. "The Politics of Sustainable Development: Emergent Arenas and Challenges for Political Science", *International Political Science Review*, April, **20** (2): 219-237.

upaya pembangunan demi tercapainya kesejahteraan sosial sesungguhnya lahir dari kesadaran yang bersifat global.

Peran dan fungsi pemerintah daerah yang maksimal semakin signifikan pada negara-negara maritim, khususnya Indonesia. Di Indonesia, letak geografis yang luas dan terdiri dari berbagai pulau sangat potensial dapat mempersulit kerja pemerintah pusat. Kebutuhan rakyat yang semakin kompleks yang tidak seimbang dengan kapasitas pemerintah pusat semakin menambah daya jangkau pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah pusat perlu membagi peran dengan pemerintah daerah dalam mengurus rakyatnya, khususnya masyarakat nelayan.

Terkait dengan sektor perikanan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fokus pada industrialisasi perikanan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.27/MEN/2012, Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Sementara itu, sasaran industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan.

Di tingkat daerah kabupaten, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah di Pulau Madura yang memiliki wilayah kepulauan cukup banyak hingga mencapai 125 pulau.³ Kenyataan tersebut secara otomatis berimplikasi pada kepemilikan wilayah laut yang besar. Kepemilikan wilayah laut yang besar ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumenep adalah daerah yang memiliki potensi sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian ITS menyatakan bahwa di Kabupaten Sumenep, potensi perikanan diperkirakan sebesar 4,58 ton ikan per kilometer persegi atau sekitar 229.000 ton per tahun.⁴

Sehingga wajar apabila di daerah kepulauan yang ada di Sumenep, kegiatan perekonomian dalam rangka meningkat kesejahteraan sangat tergantung pada hasil lautnya. Hal ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila hasil laut yang dimiliki tidak dikelola dengan baik. Adapun untuk melakukan pengelolaan yang baik itu tentunya membutuhkan suatu program strategis yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Potensi perikanan yang demikian besar itu seharusnya dapat berkontribusi besar pada peningkatan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini masih jauh di bawah sektor pertanian serta

³ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, *Pulau-Pulau di Sumenep Berjumlah 125 Pulau*, di: <http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=5835#.VoKkrPITLMw>, diakses 29 Desember 2015

⁴ Astutik, Yuni, dan Eko Budi Santoso, 2013, *Prioritas Wilayah Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sumenep*, JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539

perdagangan, hotel dan restoran. Prosentase kedua sektor ini secara berurutan adalah 46,97 persen dan 22,76 persen, sedangkan sektor lainnya berada pada kisaran 10 persen.⁵ Data ini sekaligus mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi perikanan yang dimilikinya.

Persoalan lainnya adalah perbedaan sarana dan alat tangkap yang digunakan nelayan. Apabila dilihat dalam konteks ini, sarana transportasi yang di gunakan dalam penangkapan ikan oleh nelayan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: jukung layar dan jukung mesin dengan alat tangkap gilneet, dogol, dan payang; perahu layar dan perahu mesin dengan menggunakan porsen; dan kapal mesin yang menggunakan jaring pukat. Perbedaan sarana transportasi dan alat tangkap tersebut tentunya akan menyebabkan ketimpangan hasil tangkap. Kenyataan ini juga mengindikasikan perbedaan tingkat kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jakfar Sadik,⁶ menunjukkan bahwa nelayan yang menggunakan sarana kapal mesin memiliki produktifitas yang lebih besar dibandingkan nelayan-nelayan lainnya dengan pendapatan rata-rata per rumah tangga sebesar Rp. 164.343.624,- atau sebesar Rp. 13.695.302,- per bulannya. Data ini menunjukkan bahwa selain minimnya modal dan sarana penangkapan, masyarakat nelayan di kabupaten juga sangat minim keterampilan dan

⁵ Petriyati, Nindy, 2014, *Analisis Sektor Ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, hlm. 5

⁶ Sadik, Jakfar, 2012, *Aanalisis Nilai Tukar Nelayan*, Media Trend Vol. 7 No. 2, Oktober 2012: 169-188

pengetahuan. Namun demikian, berdasarkan data tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu, sebesar 66,32 tahun meningkat dari dua tahun sebelumnya 65,60 pada tahun 2013 dan 64,24.⁷ Artinya, sebagaimana diungkapkan oleh Bupati Sumenep bahwa angka ini berada pada kriteria menengah bawah, yang menggambarkan masih perlunya upaya peningkatan agar produktifitas masyarakat semakin baik.⁸

Pengetahuan yang minim tentunya merupakan implikasi dari adanya permasalahan di bidang pendidikan. Sebagaimana diakui oleh pemerintah daerah, saat ini Kabupaten Sumenep dihadapkan pada tiga permasalahan utama dalam bidang pendidikan yaitu: akses pendidikan yang belum menjangkau ke semua lapisan masyarakat, kualitas pendidikan yang rendah, dan infrastruktur pendidikan yang belum merata, khususnya di wilayah kepulauan.⁹

Perhatian yang serius dibidang pendidikan bersifat sangat mendesak. Apalagi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 dan Hasil Analisa Pokja tahun 2014, pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep akan terus mengalami peningkatan hingga berkisar 1.089.751 jiwa pada tahun 2018. Pertumbuhan

⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, *IPM Kamajuan yang Sangat Signifikan*, di: <http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=17948#.VoKrAfTLMw>, diakses 29 Desember 2015

⁸*Ibid*,

⁹Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, *Pemkab Sumenep Serius Benahi Masalah Pendidikan*, di: <http://sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=19332#.VnatTiWqqko>, diakses 20 Desember 2015

penduduk yang besar tentu akan berdampak pada kebutuhan hidup yang besar. Hal ini tentunya akan berimplikasi pula pada semakin tingginya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut sebagai salah satu sektor ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan realitas tersebut, dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan di atas, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep telah memiliki program strategis di sektor perikanan yang disebut dengan Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP). Program ini juga telah dipertegas dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kegiatan Kerja Daerah. Program ini sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Sumenep. Karena itulah, penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2014”* ini dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini terdiri dua hal, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui:

1. Implementasi Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP).

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kebutuhan referensi dalam pengembangan mata kuliah kebijakan publik. Penelitian ini dapat memenuhi kebutuhan akademik terkait dengan pengembangan mata kuliah tersebut karena peran dasar pemerintah sebagai pelayanan publik (*public service*) menjadi fokus penelitian. Dalam teori negara modern pelayanan publik merupakan salah satu fokus kajian, yang secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

b. Manfaat Implementatif

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan dan mengaktualisasikan kebijakan publik, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai instrumen uji terhadap pelayanan-pelayanan publik

yang selama ini dilakukan. Sehingga, tujuan pelayanan publik untuk mensejahterakan rakyat benar-benar dapat tercapai dengan baik.

1.4 Definisi Konseptual dan Operasional

1.4.1 Definisi Konseptual

a. Implementasi dan Kebijakan

Implementasi merupakan tahap selanjutnya yang sangat penting setelah sebuah produk hukum dibuat oleh para pembuat kebijakan. Melalui implementasi, sebuah produk hukum dapat diukur keberhasilan maupun urgensinya. Secara konseptual, implementasi adalah mempraktekkan, memasang.¹⁰ Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.¹¹ Parsons menambahkan, kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

¹⁰ Lukman Ali, dkk., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1044

¹¹ Wayne Parsons, 2006, *Public Policy: Pentangantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, hal. 15

Dalam konteks kebijakan, sebagai sebuah tindakan, implementasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor swasta. Terkait dengan hal itu, Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.¹² Berdasarkan rumusan ini, maka proses implementasi akan dimulai apabila tujuan telah ditetapkan dengan baik.

b. Program Sistem Penyuluhan

Program umumnya dipahami sebagai unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila telah memiliki rumusan program yang jelas, baik dari aspek prosedur, tujuan yang ingin dicapai, anggaran untuk melaksanakan kegiatan, serta aturan legal yang mengizinkan kegiatan itu dilakukan. Sedangkan, sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam suatu kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun penyuluhan, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar,

¹² Samodra Wibawa, dkk., 1994, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia, hal. 15

teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dari implementasi kebijakan dapat dibagi ke dalam tiga sub: pra implemementasi, masa implementasi, dan pasca implemementasi.

a. Pra Implementasi Kebijakan

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan SDM yang berkualitas sangat penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari tujuan. Indikatornya antara lain:

a) Rekrutmen.

Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi ketersediaan SDM yang mencukupi atau memadai.

b) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan diperlukan agar SDM yang telah ada memiliki kualitas yang bisa diandalkan.

2. Ketersediaan Anggaran

Anggaran mutlak dibutuhkan dalam upaya mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Indikatornya meliputi:

a) Besaran Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan harus jelas dan transparan dalam rangka meminimalisir penyimpangan.

b) Alokasi Anggaran

Sebagaimana besaran anggaran, alokasi anggaran juga harus jelas agar implementasi kebijakan tepat sasaran dan tujuan.

b. Masa Implementasi Kebijakan

Masa implementasi kebijakan terkait kinerja aparatur negara yang dapat dipahami sebagai pelaksanaan dan hasil kerja yang dicapai.

Indikatornya:

a) Kuantitas Kerja

Jumlah pekerjaan/tugas yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan banyaknya beban tugas/pekerjaan yang ditetapkan.

b) Kualitas Kerja

Tingkat kesesuaian dari kerja yang dihasilkan menurut standar kesesuaian yang ditetapkan, seperti ketelitian, kerapian, dan ketuntasan.

c) Kehandalan

Kemampuan untuk melaksanakan/menyelesaikan tugas-tugas ataupun dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kerja/tugas.

c. Pasca Implementasi Kebijakan

Pasca implementasi kebijakan harus dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan permasalahan yang dihadapi. Indikatornya:

a) Keberhasilan

Kesesuaian antara capaian implementasi kebijakan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

b) Permasalahan yang dihadapi

Sejumlah hal yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan sehingga sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.

Adapun isi kebijakan yang diimplementasikan dalam Program Sistem Penyuluhan Perikanan (PSPP) meliputi:

a) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang usaha perikanan

Isi kebijakan ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat nelayan yang mandiri, berdaya saing, dan tidak hanya memanfaatkan hasil tangkap sebagai pemenuhan konsumsi saja.

b) Peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan tentang teknologi tangkap yang ramah lingkungan

Isi kebijakan ini dimaksudkan agar kegiatan tangkap ikan tidak hanya diorientasikan pada eksploitasi kekayaan laut demi peningkatan ekonomi keluarga, tetapi harus dibarengi dengan kesadaran

akan pentingnya pelestarian kekayaan laut untuk menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan.

- c) Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pelestarian ekosistem laut.

Isi kebijakan ini terkait langsung dengan isi kebijakan kedua yang dimaksudkan agar dalam upaya pelestarian ekosistem laut masyarakat nelayan dapat ikut terlibat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

- a) Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹³
- b) Setelah objek diteliti, data disajikan secara deskriptif. Menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁴

1.5.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara, antara lain:

¹³ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, hlm. 1

¹⁴ Sukardi, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 157

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵ Sedangkan maksud dari wawancara menurut Lincon dan Guba dalam Basrowi dan Suwandii adalah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.¹⁶ Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hal-hal terkait program sistem penyuluhan perikanan secara langsung dari pejabat pemerintah daerah atau pejabat dinas terkait.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan, observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁷

Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian

¹⁵ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 85

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Op.cit*, hlm. 86

yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pemerintah dalam program sistem penyaluran perikanan.

c. Kepustakaan

Menurut Martono, studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.¹⁸ Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta yang terkait dengan program sistem penyaluran perikanan sebelum penelitian ini dilakukan.

1.5.3 Analisa Data

Analisis data penelitian ini terdiri dari tiga tahap, antara lain:

- 1) Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*);
- 2) Menyajikan data dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*);

¹⁸Nanang Martono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan Analisis data Sekunder*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 97

- 3) Menarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*).¹⁹



¹⁹ Sugiyono, *Op.cit.*, hal. 91-99